

**IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PRESIDEN RI NO. 18 TAHUN
2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT
(Analisis Mengenai Pelaksanaan Kebijakan Visa Kunjungan
Saat Kedatangan di Kantor Imigrasi Wilayah Sumatera Utara)**

T E S I S



OLEH :

**R A M L I H S
NPM. 031801002**

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini dipertahankan didepan Panitia Penguji Tesis
Program Pascasarjana
Magister Administrasi Publik
universitas Medan Area

Pada hari : Senin
Tanggal : 6 Juni 2005
Tempat : Program Pascasarjana MAP UMA

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS (.....)
Sekretaris : Taufik Siregar, SH, M.Hum (.....)
Anggota I : Prof.DR.M. Arif Nasution, MA (.....)
Anggota II : Drs. Herikusmanto, MA (.....)
Penguji Tamu : Drs.R.Hamdani Harahap. Msi (.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis diberikan kekuatan lahir dan batin untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis sebagai tugas akhir untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program pascasarjana Universitas Medan Area.

Tesis ini merupakan suatu studi yang panjang dan cukup melelahkan, karena disusun dalam kesibukan penulis dalam menjalankan tugas rutin di Kantor Imigrasi Kelas I Medan, namun demikian berkat dorongan dari anak dan istri serta kedua orang tua ku tercinta, teman sejawat, kerabat serta terutama dari para dosen pembimbing dan seluruh staf pengajar, akhirnya penulis dapat merampungkan penelitian tentang Implementasi Keputusan Presiden RI No 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat (Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan di tempat Pemeriksaan Imigrasi Wilayah Sumatera Utara).

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Ir. Zulkarnain Lubis, MS sebagai Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA Sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area

3. Bapak Drs. Usman tarigan, MS sebagai Ketua Program Studi MAP
4. Bapak Prof.DR. M. Arif Nasution, MA Sebagai Pembimbing I
5. Bapak Drs. Heri Kusmanto, MA Sebagai Pembimbing II
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Pengajar di Program Pascasarjana Magister Administrasi Publik Universita Medan Area
7. Pimpinan dan Pegawai Kantor Imigrasi Polonia dan Belawan dimana penulis melakukan penelitian.
8. Rekan-rekanku Mahasiswa/i angkatan IV MAP UMA

Masih banyak lagi pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, dalam membantu penyelesaian penulisan karya akademik ini, semoga ALLAH SWT membalas segala budi baik Ibu Bapak sekalian.

Akhirnya tanpa mengurangi rasa terima kasih diatas, penulis menyadari bahwa karena keterbatasan kemampuan penulis baik wawasan akademis maupun pengalaman dibidang lainnya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna dan masih memerlukan kajian lebih lanjut . Oleh karena itu penulis berharap kiranya kurang sempurna tersebut untuk sementara diangkat dalam bentuk kritik demi kesempurnaan tulisan ini, semoga tulisan ini akan dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Medan, Juni 2005

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRAKSI	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Pemikiran	10
1.6 Hipotesis	11
1.7 Sistematika Penulisan	12
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Setting hubungan International	14
2.2 Konseptualisasi dan operasionalisasi kebijakan publik dan implementasinya	22

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian	33
3.2 Lokasi Penelitian	33
3.3 Populasi dan sampel	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data	35
3.5 Variabel Penelitian	35
3.6 Teknik Analisa Data	36

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN

4.1 Keimigrasian Indonesia	37
4.2 Organisasi Keimigrasian	42
4.3 Visa dalam sistim keimigrasian Indonesia	51
4.4 Lokasi Penelitian	65

BAB V : ANALISA DAN INTERPRETASI DATA

5.1 Rasionalisasi dibalik Perubahan Kebijakan	77
5.2 Desakan Untuk meninjau ulang pemberian BVKS	78
5.3 Visa On Arrival setelah satu tahun pelaksanaan (Diskripsi pada tataran nasional)	84
5.4 Diskripsi parsial pelaksanaan VOA di TPI Polonia dan Belawan Sumatera Utara	93

5.4.1	Trend kedatangan WNA sebelum dan sesudah diberlakukannya Visa Kunjungan Saat Kedatangan di TPI Polonia dan Belawan	94
5.4.2	Profil orang asing yang masuk melalui TPI Polonia dan Belawan	109
5.4.3	Problema yang dialami saat diberlakukannya Kepres 18 Tahun 2003 di TPI wilayah Sumatera Utara	120
5.4.4	Penyesuaian operasional yang dilakukan oleh TPI di wilayah Sumatera Utara dalam upaya secara efektif menjalankan kebijakan Visa Kunjungan Saat Kedatangan	124
5.4.5	Kontribusi yang diperoleh negara atas diberlakukannya VKSK khusus di wilayah Sumatera Utara	129
5.5	Kajian terhadap implementasi kebijakan VKSK Analisis berdasarkan kerangka konseptual Brian W Hoogwod dan Lewis A. Gun	132
BAB VI	: KESIMPULAN DAN SARAN	
6.1	Kesimpulan	139
6.2	Saran	144
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN	149

A B S T R A K

Bermula dari usulan Perwakilan Republik Indonesia di Saudi Arabia agar pemerintah Indonesia mencabut kebijaksanaan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) bagi warga negara Saudi Arabia yang akan berkunjung ke Indonesia, ternyata akhirnya pemerintah melakukan kajian ulang secara komprehensif terhadap kebijakan yang selama belasan tahun telah dijalankan.

Pada mulanya pemerintah memandang kebijakan BVKS sebagai kebijakan yang tepat untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pariwisata, kemudahan dalam mendapatkan visa untuk masuk ke Indonesia (BVKS berlaku bagi 49 negara) dianggap sebagai stimulus bagi peningkatan sektor tersebut, akan tetapi pada pelaksanaannya BVKS ternyata menimbulkan beberapa masalah, dan keefektifannya dalam mencapai tujuan dipertanyakan.

Sejak tanggal 1 Pebruari 2004 pemerintah merevisi kebijakan BVKS dan memberlakukan kebijakan Visa Kunjungan saat Kedatangan (VOA) terhadap sejumlah negara yang dipandang pemerintah layak untuk menerima fasilitas tersebut berdasarkan azas manfaat dan azas resiprositas.

Setelah satu tahun kebijakan tersebut dijalankan penelitian ini mampu mengungkap beberapa sisi kelebihan dan kemanfaatannya dalam

mencapai tujuan dan atau kepentingan nasional Indonesia. Sampai pada taraf tertentu penelitian ini juga mampu mengetengahkan beberapa temuan yang bermanfaat bagi penyempurnaan implementasi VKSK dimasa depan.

Secara khusus penelitian ini juga membuktikan bahwa perhitungan-perhitungan rasional tetap harus mempertimbangkan hal-hal yang diluar dugaan yang bisa menyebabkan suatu kebijakan atau ketetapan tidak dapat dijalankan secara konsisten. Bencana Alam di Nangroe Aceh Darussalam dan Nias misalnya adalah dua contoh praktis dari keterlibatan faktor-faktor tak terduga yang ternyata menjadi determinan yang bisa membuat suatu kebijakan tidak dapat secara konsisten dijalankan.

Secara keseluruhan diskripsi maupun analisis dalam penelitian ini mampu memberi gambaran umum dari ternd dan profil warga negara asing yang masuk ke Indonesia melalui pintu masuk Polonia dan Pelabuhan Belawan. Temuan-temuan dalam penelitian ini cukup fundamental dalam artian bisa digunakan sebagai fakta lapangan dalam upaya untuk menyempurnakan kebijakan VKSK maupun implementasinya dimasa depan.

Medan, Juni 2005

B A B I

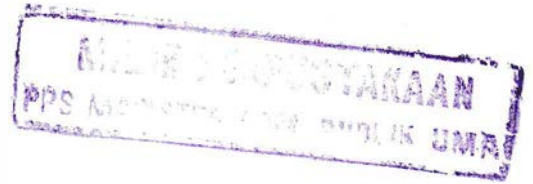
PENDAHULUAN

1.1 . Latar Belakang

Pada bulan Pebruari yang lalu, tepatnya sejak tanggal 1 Pebruari 2004, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, melalui Direktorat Jenderal Imigrasi, telah memberlakukan suatu kebijakan baru dalam bidang hubungan internasional yaitu Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Visa On Arrival) bagi orang asing yang masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia.¹ Kebijakan tersebut merupakan manifestasi akhir dari beberapa perubahan peraturan keimigrasian yang selama ini berlaku di Indonesia.

Dasar hukum bagi pemberlakuan kebijakan Visa On Arrival ini adalah Pasal 6 Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat yang kemudian lebih ditegaskan melalui Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2003. Pada pasal 3 Keppres No. 18 Tahun 2003 disebutkan bahwa ada 11 negara yang mendapatkan fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat yaitu:

¹ Perubahan kebijakan tersebut didasarkan pada Kepres No.103 Tahun 2003 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG BEBAS VISA KUNJUNGAN SINGKAT. Selanjutnya Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia mengeluarkan Kepmen Nomor: M-04.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Pada aturan Pelaksanaannya Direktorat Jenderal Imigrasi RI mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2004 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kehakiman.



1. Thailand
2. Malaysia
3. Singapura
4. Brunei Darussalam
5. Filipina
6. Hongkong SAR (Special Administration Region)
7. Macao SAR
8. Chili
9. Maroko
10. Turki
11. Peru.

Pada pasal 6 Keputusan Presiden tersebut menegaskan bahwa orang asing waraga negara dari negara lain yang tidak mendapat fasilitas Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) dapat diberikan Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKSK) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya melalui Keppres No.103 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keppres no.18 Tahun 2003 disebutkan bahwa Turki tidak lagi termasuk negara yang mendapatkan BVKS dan posisinya digantikan oleh Vietnam yang menetapkan kebijakan bebas visa bagi orang Indonesia yang memasuki wilayah negara Vietnam. Kemudian, Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia RI mengeluarkan Keputusan Menteri No. M-04.IZ-01.10 Tahun 2003

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Abdul Wabab, solichin, 2003, *Analisis Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Arif, Moehammad, 1997 *Komentar Undang Undang Keimigrasian Beserta Peraturan Pemerintah*, Jakarta : Pusdiklat Kepegawaian Departemen Kehakiman RI.
- Coulumbis, Theodore et.al, 1986, *Introduction to International Relitions : Power and Justice*, Washington DC, Prentice Hall.
- Coplin, William & Marbun Marsedes, 1992, *Pengantar Politik Internasional : Suatu Telaahan Analisis*, Bandung : Sinar Baru.
- Danim, Sudarwan, 2000, *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, William N, 2003, *Analisis Kebijakan Publik*, Jogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Edward III, 1980, *Implementation Public Policy*, Washington DC : Congresional Quarter Press.
- Islamy, Irfan M, 2003, *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Mazmanian, Daniel H, dan Sabatier Paul A, 1983, *Implementation and Public Policy*, New York : Haper Collins.
- Nogi, Hessel S Tangkilisan, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik*, Jakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework*, Departemen Of Political Science Ohio State University
- Nogi, Hessel S Tangkilisan, 2003, *Implementasi Kebijakan Publik*, Jakarta : Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.

- Nugroho D, Riant, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Republik Indonesia, 1992, *Undang Undang No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Jakarta Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Salusu J, 2003, *Pengambilan Keputusan Stratejik*, Jakarta : Gramedia
- Santoso, Iman, 2004, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta : UI Press
- Sjahriful, Abdullah, 1992, *Komentar Atas Undang Undang No. 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Winarno, Budi, 2004, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Jakarta : Media Pressindo.

